Serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 ke SKPD, Penjabat Bupati Tabalong Ingin Serapan Anggaran Bisa Meningkat

Sumber gambar:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/13/serahkan-dpa-2025-ke-skpd-pj-bupati-tabalong-ingin-serapan-anggaran-bisa-meningkat

Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 diserahkan kepada seluruh SKPD di lingkup Pemkab Tabalong, Senin (13/1/2025) pagi. Penyerahan DPA tahun 2025 ini dilakukan, Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah, sebelum dimulainya rapat koordinasi (rakor) bulanan di Pendopo Bersinar. Saat itu secara simbolis, DPA tahun 2025 diserahkan ke perwakilan SKPD, di antaranya Bapenda, Inspektorat, Bapperida, DMPD dan juga Kecamatan Murung Pudak.

"Hari ini ada penyerahan DPA ke seluruh SKPD, tadi diwakili beberapa SKPD," kata Pj Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah,.ditemui usai rakor bulanan.

Dengan dilakukannya penyerahan ini diharapkannya SKPD bisa segera menindaklanjutinya dengan mempercepat proses kegiatan program yang sudah tertuang dalam DPA. Tujuannya tidak lain agar realisasi anggaran pada tahun 2025 ini bisa lebih maksimal dan meningkat dibandingkan tahun 2024.

Dimana pada tahun 2024 realisasi anggaran berada di angka sekitar 85 persen dan ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang ada di angka 86 persen. Sedangkan di Untuk 2025 pihaknya memiliki target realisasi anggaran jauh bisa meningkat dibanding tahun 2024. "Paling tidak diupayakan 90 persen," kata Hj Hamida.

Sehingga untuk itu dirinya meminta kepada seluruh SKPD untuk bisa secepatnya memproses program kegiatan agar secepatnya bisa dilaksanakan. Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Tabalong, Husin Ansari, mengatakan, penyerahan DPA ini sebagai tindaklanjut telah terbitnya Perda APBD 2025.

"Sebenarnya Perda tentang APBD 2025 ini sudah ditetapkan pada 31 Desember 2024, cuma kami melakukan penyerahan secara simbolis hari ini," ujar Husin. Dengan telah diserahkannya maka dapat dilakukan tahapan berikut untuk bisa melaksanakan beberapa kegiatan di masing-masing SKPD. Walaupun sebenarnya kegiatan sudah berjalan sejak 2 Januari 2025, dengan sudah adanya dilakukan pembayaran gaji ASN.

Husin juga menambahkan untuk bisa menaikan serapan anggaran sebagaimana target yang dinginkan, maka ada beberapa langkah yang dilakukan. Di antaranya, anggaran kas akan diperbanyak untuk triwulan pertama, Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran tidak lagi setiap awal tahun tetapi bisa berlaku sampai ada mutasi penguna anggarannya.

Kemudian batas kontrak juga akan diatur, dimana untuk yang menggunakan APBD induk masa kontrak berakhir sampai 30 Oktober dan yang di APBD Perubahan di 15 Desember 2025. "Jadi tidak ada lagi yang di 31 Desember berakhirnya, sehingga bisa lebih cepat pekerjaan diselesaikan," ujarnya.

Sumber Berita

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/13/serahkan-dpa-2025-ke-skpd-pj-bupati-tabalong-ingin-serapan-anggaran-bisa-meningkat, 13, Januari 2025.
2. https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/pj-bupati-tabalong-serahkan-dpa-skpd-anggaran-2025/2025/, 13 Januarai 2025.

Catatan Berita

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima)

tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004,

kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing–masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah

melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkankan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.
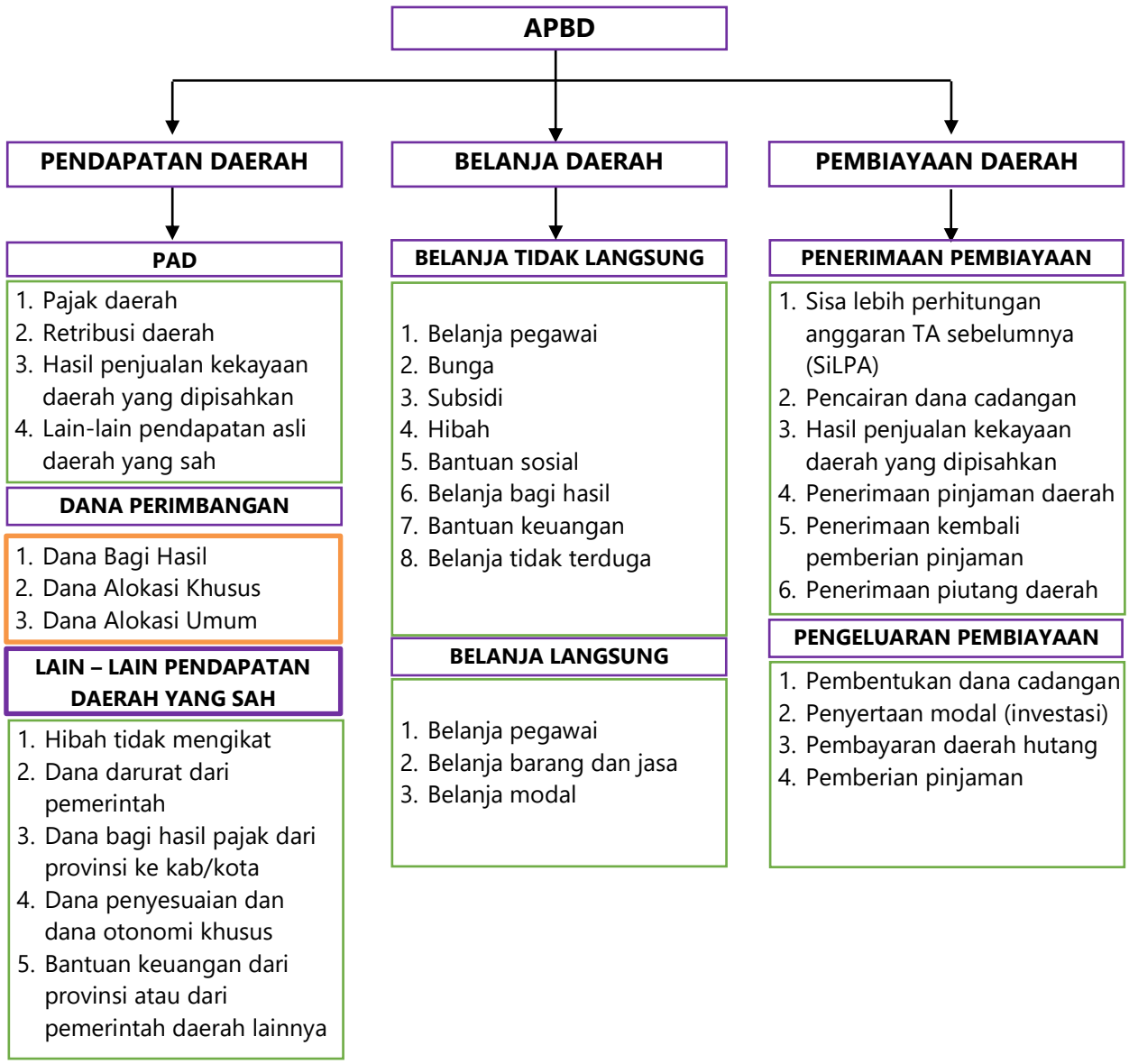
Struktur APBD